

Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai: Potret dan Insight untuk Warga

Kategori: Majalah Pendidikan · Diunduh dari BalaiWarga.NET

Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai: Potret dan Insight untuk Warga Diperbarui 16 Juli 2026

Potret Cepat Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai

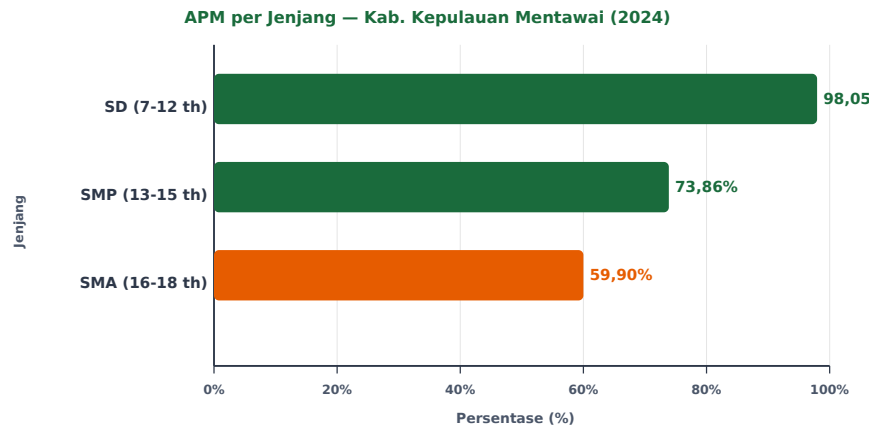
Menurut BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (2024), Angka Partisipasi Murni (APM) SD mencapai 98,05 persen, hampir universal. APM SMP turun ke 73,86 persen, dan APM SMA hanya 59,90 persen — satu dari empat anak usia SMA tidak bersekolah sesuai jenjang. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tercatat 111,55 persen, APK SMP 99,00 persen, dan APK SMA 82,17 persen (BPS, 2024). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 8,21 tahun pada 2025, di bawah rata-rata Sumatera Barat (9,77 tahun) dan nasional (9,07 tahun), menurut BPS. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 137 SD dan 39 SMP sederajat yang tersebar di 10 kecamatan (Kemendikdasmen, 2025). Tingkat kemiskinan tercatat 13,99 persen dari 92.760 jiwa penduduk (BPS, 2025).

APM SMA Kepulauan Mentawai 59,90% — 4 dari 10 Anak Usia SMA Belum Terjangkau

Menurut BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (2024), partisipasi sekolah dasar sudah mendekati universal, tetapi terjadi penurunan drastis di jenjang atas. Di wilayah kepulauan 3T ini, faktor geografis, biaya transportasi laut, dan kemiskinan menjadi hambatan struktural yang memengaruhi anak-anak untuk bertahan di sekolah hingga jenjang SMA. Warga dapat memantau program BOS dan PIP melalui sekolah setempat sebagai salah satu mekanisme penopang partisipasi siswa rentan.

Data dan Infografis Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai

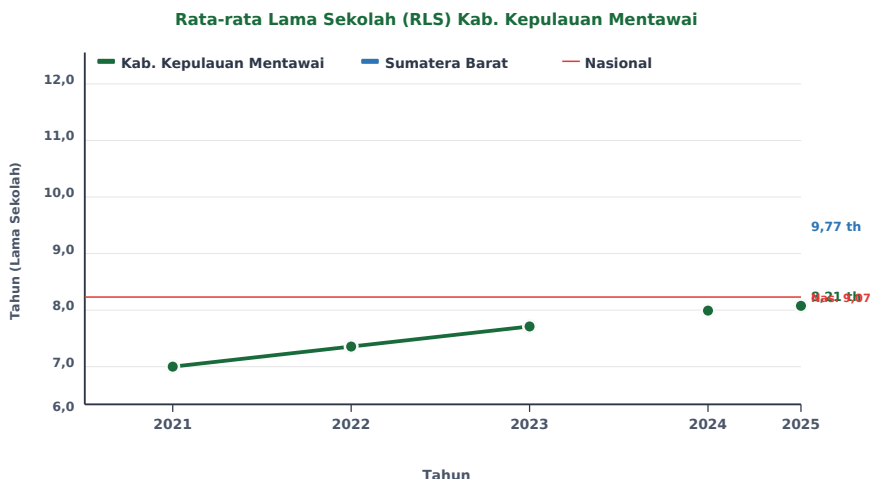
Angka Partisipasi Murni (APM) per Jenjang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (2024). APM SD mendekati universal; APM SMA turun drastis mencerminkan tantangan retensi di jenjang atas.

Menurut BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (2024), APM SD sebesar 98,05 persen menunjukkan hampir seluruh anak usia sekolah dasar sudah terdaftar di jenjang yang tepat. Namun, penurunan tajam terjadi di SMP (73,86 persen) dan semakin dalam di SMA (59,90 persen). Kesenjangan APM SD—SMA sebesar 38,15 poin persentase menggambarkan pola putus sekolah yang terjadi seiring anak bertumbuh. Dari 100 anak usia SMA di Kepulauan Mentawai, hanya sekitar 60 yang masih bersekolah sesuai jenjangnya; 40 lainnya sudah tidak berada di sistem pendidikan formal.

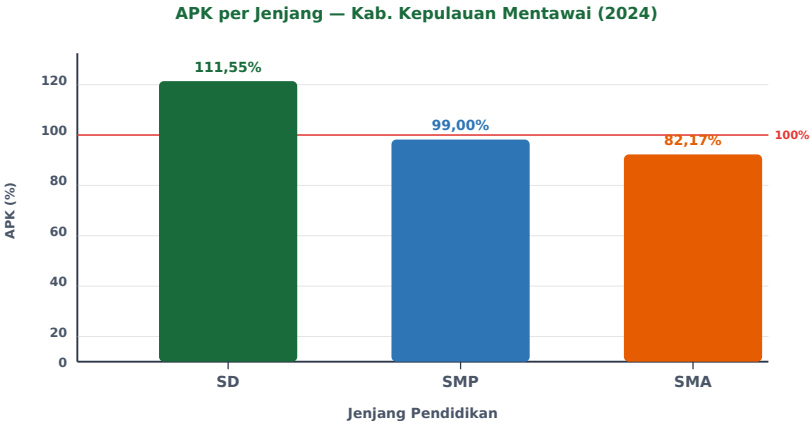
Tren Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kepulauan Mentawai vs Komparasi, 2021-2025



Sumber: BPS / Databoks (2025). RLS Kepulauan Mentawai naik 1,12 tahun dalam lima tahun terakhir, namun masih berada di posisi terendah dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Menurut BPS yang dikutip Databoks (2025), RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat dari 7,09 tahun (2021) menjadi 8,21 tahun (2025), kenaikan sebesar 1,12 tahun atau 15,8 persen dalam lima tahun. Namun angka ini masih di bawah rata-rata Sumatera Barat (9,77 tahun) dan nasional (9,07 tahun). Kepulauan Mentawai menempati posisi ke-19 dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat untuk indikator RLS, menunjukkan bahwa meski terjadi peningkatan, kesenjangan dengan wilayah lain masih signifikan. Rata-rata penduduk Mentawai usia 25 tahun ke atas baru menyelesaikan pendidikan setara kelas VIII SMP.

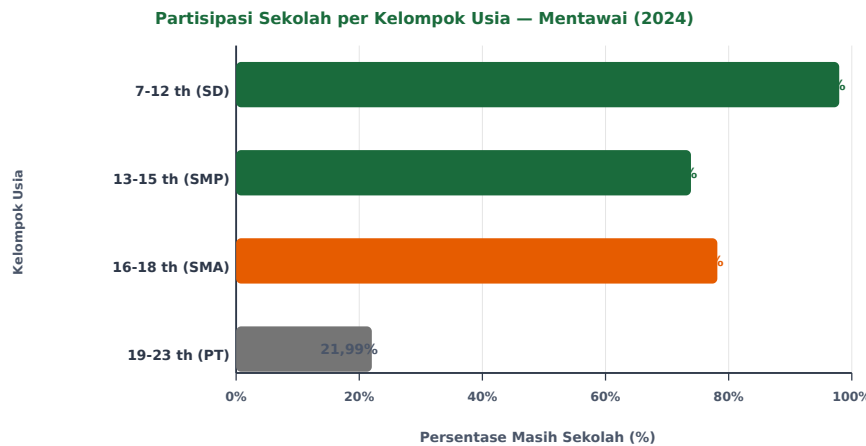
Angka Partisipasi Kasar (APK) per Jenjang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (2024). APK SMA 82,17% menunjukkan kapasitas sistem pendidikan menengah atas belum mampu menjangkau seluruh penduduk usia SMA.

APK SD sebesar 111,55 persen menunjukkan terdapat siswa yang bersekolah di luar rentang usia ideal, mencerminkan penerimaan siswa usia lebih tua atau siswa yang tinggal kelas. APK SMP 99,00 persen mengindikasikan hampir semua anak usia SMP masih dapat tertampung, meski tidak semuanya berada di jenjang yang tepat. APK SMA 82,17 persen (BPS, 2024) menunjukkan bahwa 17,83 persen anak usia SMA sama sekali tidak tercakup dalam sistem pendidikan menengah atas. Jarak antara APK SD dan APK SMA mencapai 29,38 poin persentase, mencerminkan tingginya pelepasan siswa dari sistem pendidikan seiring meningkatnya jenjang.

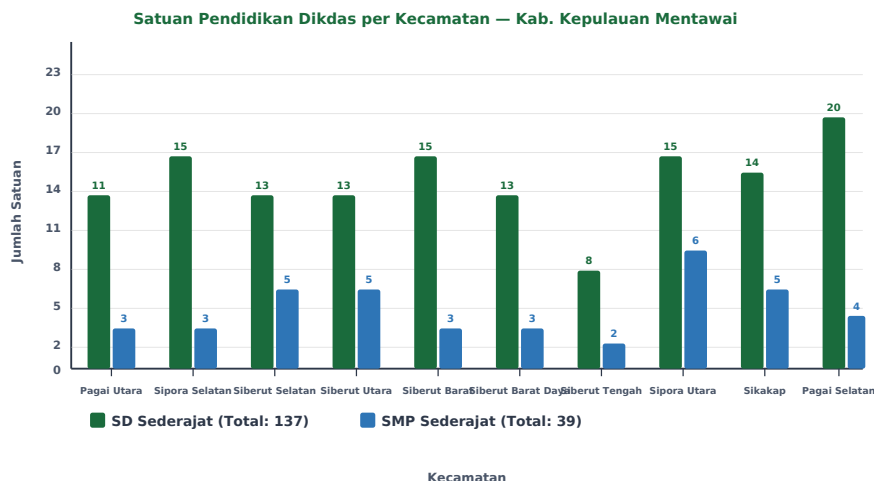
Mentawai, 2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (2024). Hanya 21,99% penduduk usia 19-23 tahun yang masih mengikuti pendidikan, menandai rendahnya akses ke perguruan tinggi dari Kepulauan Mentawai.

Menurut BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (2024), partisipasi sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun sangat tinggi (98,05 persen), namun turun ke 73,86 persen pada usia 13-15 tahun. Pada kelompok usia 16-18 tahun, 78,19 persen masih bersekolah, namun 20,45 persen sudah tidak bersekolah lagi — berarti satu dari lima remaja usia SMA sudah keluar dari sistem. Untuk kelompok 19-23 tahun, hanya 21,99 persen yang masih menempuh pendidikan, dan 77,06 persen sudah tidak sekolah. Pola ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar pendidikan Mentawai bukan lagi pada akses SD, melainkan pada retensi siswa di jenjang menengah atas dan akses ke perguruan tinggi.

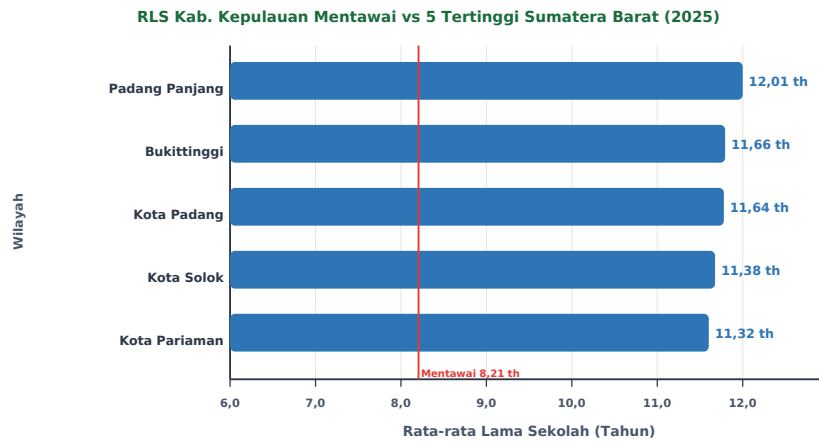
Jumlah Satuan Pendidikan Dikdas per Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber: Kemendikdasmen, referensi.data.kemendikdasmen.go.id (2025). Total 176 satuan pendidikan dasar tersebar di 10 kecamatan; kecamatan Pagai Selatan memiliki satuan SD terbanyak (20) dan Siberut Tengah paling sedikit (8 SD, 2 SMP).

Menurut Kemendikdasmen (2025), Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 137 satuan pendidikan SD sederajat dan 39 SMP sederajat yang tersebar di 10 kecamatan. Pagai Selatan memiliki jumlah SD terbanyak (20 satuan), sementara Siberut Tengah memiliki paling sedikit (8 SD dan 2 SMP). Sipora Utara memiliki 6 SMP — jumlah tertinggi — mencerminkan fungsinya sebagai pusat administratif kabupaten. Rasio jumlah SD terhadap SMP secara keseluruhan adalah 3,5:1, menandakan ketersediaan jenjang lanjutan yang lebih terbatas dibandingkan jenjang dasar. Di wilayah kepulauan dengan 10 kecamatan dan jarak antarpulau yang jauh, distribusi satuan pendidikan menjadi faktor penentu aksesibilitas bagi anak-anak.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kepulauan Mentawai vs Lima Tertinggi di Sumatera Barat, 2025



Sumber: BPS / Databoks (2025). RLS Kepulauan Mentawai (8,21 tahun) merupakan yang terendah di Sumatera Barat — jauh di bawah RLS tertinggi Kota Padang Panjang yang mencapai 12,01 tahun; selisih 3,8 tahun setara hampir 4 jenjang kelas.

Menurut BPS yang dikutip Databoks (Juli 2025), Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki RLS 8,21 tahun, menjadikannya posisi ke-19 atau terendah dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Sementara Kota Padang Panjang mencapai RLS 12,01 tahun, yang berarti selisih antara tertinggi dan terendah di provinsi ini adalah 3,8 tahun — setara dengan hampir empat jenjang kelas. Angka RLS 8,21 tahun menunjukkan rata-rata penduduk dewasa Mentawai baru menyelesaikan pendidikan hingga setara kelas VIII SMP. Lima kota dengan RLS tertinggi di Sumatera Barat adalah kota-kota di daratan Sumatera, sementara Mentawai sebagai satu-satunya wilayah kepulauan 3T di provinsi ini berada di posisi paling bawah, menggambarkan tantangan struktural yang khas wilayah kepulauan terpencil.

Akses Perguruan Tinggi dari Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak memiliki perguruan tinggi di dalam wilayahnya. Menurut PDDikti (Kemendiksisaintek), akses perguruan tinggi terdekat bagi warga Mentawai adalah melalui penyeberangan ke daratan Sumatera Barat, khususnya ke Kota Padang yang memiliki beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Andalas (Unand, terakreditasi Unggul oleh BAN-PT), Universitas Negeri Padang (UNP), dan Institut Teknologi Padang (ITP). Pada Februari 2026, Institut Teknologi Bandung (ITB) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

sama formal bagi putra-putri Mentawai yang ingin menempuh pendidikan tinggi. Data BPS (2024) menunjukkan hanya 21,99 persen penduduk usia 19-23 tahun yang masih menempuh pendidikan, mencerminkan rendahnya akses ke perguruan tinggi dari wilayah kepulauan 3T ini.

Berita Pendidikan Terkini Kabupaten Kepulauan Mentawai

MPLS di SMPN 2 Sipora, Kejari Kepulauan Mentawai Gelar Sosialisasi Anti Korupsi Sejak Dini

Kejaksanaan Negeri Kepulauan Mentawai menyelenggarakan sosialisasi antikorupsi bagi siswa baru di SMPN 2 Sipora dalam rangka MPLS tahun ajaran 2026/2027 sebagai upaya membangun karakter berintegritas sejak dini.

[Baca selengkapnya — Minangkabaunews, Juli 2026](#)

Sekolah Rakyat, Jawaban dari Puluhan Tahun Persoalan Pendidikan di Mentawai

Pemerintah pusat akan membangun Sekolah Rakyat di Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan, sebagai program asrama terpadu untuk anak-anak dari keluarga miskin di daerah 3T Kepulauan Mentawai.

[Baca selengkapnya — Sumbarsatu, 22 Juni 2026](#)

Disdikbud Gelar Advokasi Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, Perkuat Komitmen Dunia Pendidikan di Kepulauan Mentawai

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Mentawai menyelenggarakan advokasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun termasuk 1 tahun PAUD untuk menggalang dukungan regulasi lintas sektor demi perluasan akses pendidikan.

[Baca selengkapnya — Minangkabaunews, 4 Juni 2026](#)

BalaiWarga.NET	Cetak PDF
----------------	-----------

45 Sekolah di Kepulauan Mentawai Mendapatkan Kucuran Dana Revitalisasi dari Pemerintah Pusat

Sebanyak 30 SD dan 15 SMP di Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima dana revitalisasi dari program nasional Rp14 triliun, ditransfer langsung ke rekening sekolah untuk perbaikan sarana dan prasarana.

[Baca selengkapnya — Minangkabaunews, 26 Mei 2026](#)

Disdikbud Mentawai Perkuat Tata Kelola Keuangan Sekolah melalui Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOS SD TA 2026

Disdikbud Kepulauan Mentawai menggelar bimbingan teknis pengelolaan dana BOS SD bagi kepala sekolah dan bendahara dari seluruh kecamatan, dengan target kepatuhan pelaporan 100 persen pada tahun anggaran 2026.

[Baca selengkapnya — Disdikbud Mentawai, 24 April 2026](#)

Perkuat Kolaborasi Pendidikan dan Pembangunan, ITB Jalin Kerja Sama dengan Pemkab Kepulauan Mentawai

Institut Teknologi Bandung menandatangani MoU dengan Pemkab Kepulauan Mentawai di Bandung, membuka kerja sama jangka panjang dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah kepulauan.

[Baca selengkapnya — ITB.ac.id, 8 Februari 2026](#)

Ajang GTK Tingkat Provinsi 2025, SMPN 2 Sirilogui Mentawai Raih Penghargaan Terbaik I Guru Dedikatif

SMPN 2 Sirilogui Kabupaten Kepulauan Mentawai meraih penghargaan Terbaik I Guru Dedikatif dalam ajang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, menjadi representasi kualitas pendidik dari daerah 3T.

[Baca selengkapnya — Minangkabaunews, 2025](#)

Pembahasan: Apa Kata Data dan Berita untuk Warga Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pola Data Infografis: Disparitas Jenjang dan Tantangan Retensi di Kepulauan 3T

Data BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (2024) menggambarkan pola yang khas untuk wilayah kepulauan terpencil: akses pendidikan dasar sudah mendekati universal (APM SD 98,05 persen), namun terjadi penurunan tajam di jenjang menengah (APM SMA 59,90 persen). Dalam kerangka pemikiran H.A.R. Tilaar tentang sosiologi pendidikan multikultural dan disparitas kualitas antardaerah, angka RLS 8,21 tahun yang berada di posisi terendah dari 19 kabupaten/kota Sumatera Barat mencerminkan kesenjangan struktural yang tidak terselesaikan hanya dengan membangun gedung sekolah. Kondisi geografis Kepulauan Mentawai — 4 pulau besar dan 103 pulau kecil dengan transportasi laut yang mahal — menjadi faktor pembatas yang bersifat fisik. Soedjatmoko, dalam perspektif human development untuk daerah tertinggal, menekankan bahwa pendidikan di wilayah 3T memerlukan pendekatan yang mengakui konteks lokal: ketika 20,45 persen remaja usia SMA sudah tidak bersekolah dan hanya 21,99 persen usia 19-23 tahun yang masih menempuh pendidikan, ini bukan semata masalah ketersediaan sekolah, melainkan hambatan ekonomi, jarak, dan biaya transportasi yang memutus rantai pendidikan. Warga dapat mempertimbangkan pola data ini saat merencanakan jenjang pendidikan anak dengan memperhitungkan faktor keterjangkauan jarak dan biaya.

Sintesis Berita: Momentum Kebijakan dan Program Dukungan untuk Warga Mentawai

Serangkaian berita terkini mencerminkan penguatan ekosistem pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berlangsung secara bersamaan dari berbagai arah. Program revitalisasi 45 sekolah (30 SD dan 15 SMP) pada 2026 mencerminkan implementasi kebijakan nasional Merdeka Belajar yang menekankan perbaikan kualitas fasilitas sebagai prasyarat pembelajaran bermakna. Di sisi lain, advokasi Wajib Belajar 13 Tahun oleh Disdikbud Mentawai menunjukkan upaya daerah untuk melembagakan intervensi PAUD sebagai fondasi awal. Dalam kerangka kebijakan BOS dan PIP yang menjadi bantalan finansial bagi siswa rentan, bimbingan teknis pengelola BOS SD dengan target kepatuhan 100 persen pada 2026 menandakan perhatian pada kualitas tata kelola. Wardiman Djojonegoro dengan konsep "link and match" relevan di sini: ketika ITB menandatangani MoU dengan Pemkab Mentawai, terbuka kemungkinan jalur pendidikan tinggi yang terhubung dengan potensi lokal seperti pariwisata dan kelautan. Arief Rachman dalam perspektif pendidikan humanis menekankan pentingnya pengembangan

menjadi sinyal bahwa potensi SDM pendidik dari daerah 3T dapat berkembang. Warga dapat mengakses informasi program BOS dan PIP melalui Disdikbud Kepulauan Mentawai di Tuapejat, atau memantau perkembangan revitalisasi sekolah melalui laman disdikbud.mentawaikab.go.id.

Pertanyaan Warga tentang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Bagaimana cara mengecek akreditasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai?

Warga dapat mengecek status akreditasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui situs banpdm.id dengan memasukkan nama sekolah atau NPSN. Data ini diperbarui setiap tahun oleh BAN-PDM dan mencakup seluruh jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Bagaimana cara mendapatkan bantuan PIP bagi siswa di Kepulauan Mentawai?

Program Indonesia Pintar (PIP) dapat diakses melalui sekolah tempat siswa terdaftar. Pihak sekolah mengusulkan nama siswa yang memenuhi syarat melalui sistem Dapodik. Orang tua dapat menghubungi bendahara BOS atau kepala sekolah untuk mendapatkan informasi syarat dan proses pengajuan PIP.

Berapa angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Kepulauan Mentawai?

Menurut BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (2024), APM SD mencapai 98,05 persen, APM SMP 73,86 persen, dan APM SMA 59,90 persen. Penurunan signifikan terjadi di jenjang SMA, yang menunjukkan bahwa banyak anak usia SMA belum bersekolah sesuai jenjangnya.

Apa saja program pemerintah untuk pendidikan di Kepulauan Mentawai?

Program aktif di Kepulauan Mentawai meliputi BOS (Bantuan Operasional Sekolah), PIP (Program Indonesia Pintar), Kurikulum Merdeka, Revitalisasi Sekolah (45 sekolah pada 2026), dan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Saureinu, Sipora Selatan, sebagai program nasional prioritas daerah 3T.

Bagaimana cara mengetahui data jumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai?

Data jumlah sekolah dapat diakses melalui laman referensi.data.kemendikdasmen.go.id dengan memilih Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Per data Kemendikdasmen terkini, terdapat 137 SD dan 39 SMP sederajat yang tersebar di 10 kecamatan wilayah kepulauan ini.

Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai informasi awal dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) berdasarkan data dan referensi yang tersedia hingga tanggal publikasi. Konten ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan saran profesional, konsultasi langsung, atau kebijakan resmi yang berlaku. Selalu verifikasi ke instansi terkait, asosiasi industri, atau sumber primer yang relevan.